

PIKUM. 21/05  
004.

Layanan Pengajaran

(12)

62

KOLEKSI KARSUS

CHRISTIAGAAN UNIVERSITAS ANDALAS

Fakultas Peningkatan Pengembangan Perguruan  
Tinggi Universitas Andalas.  
Kontrak No. 37/PPUA/I/1984.

DAMPAK PRONA DAN REALISASINYA DI KOTAMADYA PADANG.

Dileh

SAFRI SJAM, SH

Fak. Hukum



UNIVERSITAS ANDALAS  
PUSAT PENELITIAN  
PADANG, 1985.

## B A B . I

### P E N D A H U L U A N

#### A. PERMASALAHAN.

Berbicara tentang Dampak Prona di Kota Madya Padang, sebenarnya tidak lepas dari membicarakan UUPA yaitu UU No. 5 Tahun 1960 L.H.No. 104 tahun 1960, yakni Unifikasi Hukum tentang tanah di Indonesia, sekaligus dengan berlakunya UU No. 5 tahun 1960, tidak berlaku undang-undang tentang tanah yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang yang dibuat zaman Belanda atau zaman Kolonial pemerintah Belanda yang dianggap sebagai undang-undang yang cukup teratur tentang tanah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 UUPA, maka juga membawa perombakan hukum tentang tanah di Indonesia yang secara menyeluruh baik falsafah, maupun azas dan dasarnya begitu juga bentuk haknya. Dapat dikatakan ini adalah merupakan suatu pekerjaan yang besar, dan hal ini dapat dilihat secara konkret dan nyata, sebab apabila tanah ini terdaftar sesuai dengan ketentuan pasal 19 UUPA yang bertuliskan sebagai berikut :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah RI menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah .
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat(1) pasal ini meliputi :
  - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat .

### B A B . III

#### HASIL-HASIL DAN PEMERKUAN PENELITIAN

Pada Bab III akan dikemukakan hasil dan penemuan-penemuan penelitian yang mencakupi : 1. Identitas responden, 2. Pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan Prona, UUPA di Kota Madya Padang.

##### 1. I ds 1. Identitas responden .

Dalam suatu penelitian biasanya cukup menentukan, terutama untuk memberikan informasi dari siapa data yang disajikan itu didapat. Apakah data yang disajikan responden itu adalah data dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Apakah komponen yang disajikan ~~subordidatmelévit denganimasaizh~~ yang dipecahkan. Dalam penelitian ini identitas responden yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1.1. Responden telah ditetapkan sebanyak 100 orang dan diantara 100 orang tersebut terdiri dari 96 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Terlihat disini jumlah pria lebih banyak dari jumlah laki-laki dari komponen yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh karena ada diantara komponen cerdik pandai diambil dari golongan wanita. Untuk jelasnya seperti terlihat pada tabel 1.1. dibawah ini .

Tabel 1.1. Jenis Kelamin Responden .

Jenis kelamin	:	Jumlah
Laki-laki	:	96
Perempuan	:	4
J u m l a h	:	100

## BAB . IV

### KESIMPULAN

Pada Bab IV ini merupakan terakhir dari laporan ini, akan dikomunikakan penilaian terhadap usaha atau pekerjaan penelitian yang telah dilakukan dan akan membuat suatu penafsiran terhadap materi atau hasil penelitian. Sesuai dengan intar belakang pemikiran untuk melakukan penelitian itu dimana dikatakan pelaksanaan pembangunan Kota Madya Padang yang pesat perkembangannya masih menemui kesulitan dalam penggunaan tanah dalam pembangunan tersebut, kesulitan mana disebabkan masih banyak tanah yang belum terdaftar dan merupakan tanah suku/kaum yang memiliki cukup besar jumlahnya, sedangkan untuk memudahkan melakukan segala sesuatu mengenai pemindahan hak memerlukan waktu yang cukup lama dan bermilir-milir.

Dalam kendala demikian muncullah SK Menteri Dalam Negeri No.109/1981 tgl. 15 - 3 - 1981 yang terkenal dengan Prona suatu usaha hari ini dalam menarik atau menimbulkan hasrat masyarakat untuk mensertifikasikan tanahnya. Bawa yang merupakan masalah sekarang tergantung pada petugas yang sangat memerlukan pengabdian jiwa ditengah keadaan kesusahan masyarakat itu dalam melayani pelaksanaan Prona ini.

Melalui penelitian diusahakan untuk mengetahui sejauh mana dampak pronra terlihat dan terasa dalam pergaulan masyarakat Kota Madya Padang, dimana pemerintah Kota Madya Padang sedang giat membangun fisik dan membangun mental yang merupakan realisasi dari cita-cita membangun manusia seutuhnya, untuk itulah dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Perhatian masyarakat untuk memprioritaskan tanahnya cukup besar dan masih banyak masyarakat mendefinisikan tanah setinggi melibati keruangan ditargetkan.

- Penyuluhan dan penerangan oleh pihak pemerintah untuk menganjurkan mensertifikatkan tanahnya melalui Prona ini cukup berhasil menimbulkan minat masyarakat khususnya Kotamadya Padang .
- Dalam pelaksanaan masyarakat masih menemui kesulitan melalui petugas yang jumlahnya sedikit sedang yang dikerjakan cukup banyak .
- Dalam pelaksanaan pemungutan biaya yang jumlahnya sedikit itu sebagaimana ditentukan peraturan,kalau tidak ada tambahan oleh masyarakat maka dapat mengakibatkan pelaksanaan akan terlambat .
- Pelaksanaan secara murni Prona ini dalam masyarakat oleh petugas sedikit kemungkinan tercapai dan adalah merupakan hal yang ideal sejauh yang tak akan tercapai dalam kehidupan masyarakat .
- Diharapkan pada pemerintah akan memperbesar jumlah prona ini,dan usaha-usaha yang akan menarik minat masyarakat dalam mensertifikatkan tanah suku,tanah pribadinya,sebab dengan jumlah biaya sedikit mereka dapat mensertifikatkan tanahnya .

Dari penelitian ini selanjutnya dapat juga disimpulkan bahwa tidak dapat secara murni pelaksanaan prona ini,karena insentif petugas sangat kecil sedangkan mereka mempunyai biaya yang besar dan cukup. Jika dilapangan,maka dengan melalui penelitian ini agar pemerintah memberikan honor petugas yang cukup memadai,sehingga mereka tidak merembes ke masyarakat yang tanahnya dipronakan,khususnya dalam masyarakat Kota Padang .

---

DAFTAR REFERENSI

1. R.Roesandi,Ardiwilaga : Hukum Agraria Indonesia dalam teori dan praktik ,cetakan kedua,Penerbit Widya Baru Bandung ,1962
2. Boedi,Harsono,SH : Undang-undang Pokok Agraria,Sejauh Penyusunan,Istilah dan pelaksanaannya Hukum agraria Indonesia,Bagian Pertama,jilid pertama,Penerbitan Djambatan,cetakan ketiga.,1970.
3. Boedi,Harsono,SH : Undang-undang Pokok Agraria,Sejauh Penyusunan,Istilah dan Pelaksanaan ,Kimpungan Penerbitan Hukum Agraria Indonesia,Bagian kedua,cetakan pertama Djambatan,Jakarta ,1975 .
4. Mochtar,Naim,Dr. : Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Sumatera ( Seminar Hukum Adat Minangkabau ),Centre for Minangkabau Studies,Sumatra Tengah,Indonesia,1969 .
5. Syamsulbahri,SH : Hukum Agraria Indonesia Dulu dan Kini,2. cintas Hukum dan Pengembangan Masyarakat Universitas Andalas,jilid I,1970 .
6. R S D C.Univ.Andalas : Prona dan Pelaksanaannya di Sumatera Barat, (Diskusi Ilmiah) ,September ,1982 .

KILASAN KHIDIR

EDISI UNTUK STAFF DAN MAHASISWA